

BAB II

THE SHADOW PANDEMIC DI INDIA

The shadow pandemic mengacu pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan selama pandemi COVID-19. Fenomena ini terutama terjadi di India, di mana entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk UN India, merespons peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan selama pandemi ini. Pandemi Bayangan di India ditandai dengan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan, yang diperburuk dengan penerapan lockdown dan penjarakan sosial untuk memerangi penyebaran COVID-19. Hal ini menyebabkan meningkatnya laporan kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan, yang seringkali dilakukan oleh pasangan dekat atau anggota keluarga. Lockdown, yang membatasi mobilitas dan meningkatkan tekanan ekonomi, menciptakan badai besar yang meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memahami hal ini, maka dalam penelitian ini, pada Bab II akan mendeskripsikan dinamika kekerasan terhadap perempuan di India, terutama pada masa Covid-19. Kemudian akan dijelaskan juga sebuah entitas PBB yang bergerak dalam bidang terkait, yaitu UN Women dalam upaya pengentasan kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, penelitian dalam bab ini akan diuraikan menjadi beberapa bagian.



Gambar 2. The Shadow Pandemic

Sumber: Australasian Institute of Digital Health, 2022

Pada bagian pertama, penelitian ini menggambarkan mengenai dinamika kekerasan terhadap perempuan di India. Pada bagian ini diberikan penjelasan mengenai jenis- jenis kekerasan terhadap perempuan di India, data- data berupa peningkatan kekerasan terhadap perempuan di India terutama selama pandemi Covid-19, serta alasan terjadinya peningkatan kasus kekerasan selama pandemi Covid-19. Pada bagian kedua diuraikan mengenai sejarah dari adanya UN Women di India, apa saja tugas yang mereka jalankan, dan kontribusi yang mereka lakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di India.

2.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di India

2.1.1 Perkembangan Kekerasan Terhadap Perempuan di India

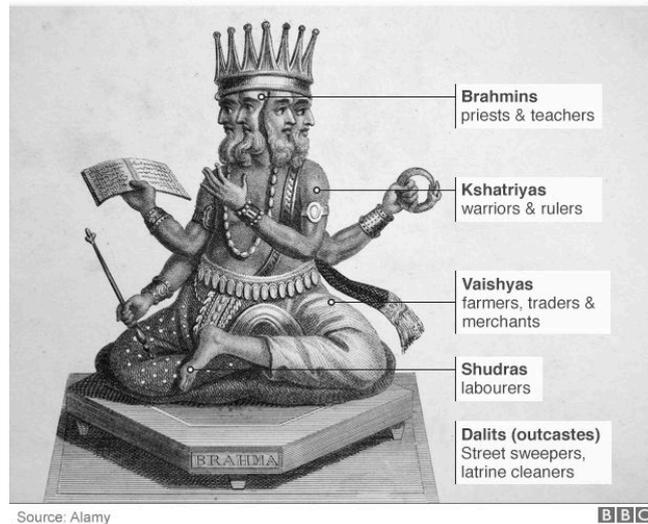
Kekerasan terhadap perempuan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Praktik ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki- laki dan perempuan. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis menyerang perempuan dalam proporsi masif di seluruh dunia. Kekerasan ini terjadi di berbagai kelas sosial dan ekonomi, agama, ras, serta etnis. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pemerkosaan, kekerasan terhadap

perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Tidak hanya mengancam fisik dari korban saja, kekerasan terhadap perempuan juga mengancam kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Perempuan yang mengalami kekerasan dapat mengalami peningkatan risiko cedera, depresi, gangguan kecemasan, kehamilan yang tidak direncanakan, infeksi menular seksual, serta banyak masalah kesehatan lainnya. Perempuan seakan tidak memiliki ruang aman tersendiri, baik di ranah publik maupun ruang privasinya sendiri (Tjaden, 2004).

Pada akhir tahun 2023, India menjadi bahan perbincangan di berbagai sosial media dikarenakan maraknya tingkat kekerasan terhadap perempuan di sana, terutama dalam hal pelecehan seksual. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia ini juga disebut sebagai negara yang tidak aman bagi perempuan di dunia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di India (Sabri et al., 2022).

Masyarakat India hidup dengan beragam agama dan budaya. Kasta merupakan hal yang kompleks dan penting bagi masyarakat India. Masyarakat India dibagi menjadi empat *varna* atau kasta, sesuai dengan sifat pekerjaan mereka: Brahmana - pendeta, Kshatriya - prajurit, Waisya - pedagang dan Shudra - buruh atau orang yang tidak tersentuh, adapun kasta/ terendah yaitu Dalit (Vesvikar, 2016).

Brahma and the origins of caste



Gambar 3. Pembagian Kasta India

Sumber: BBC, 2019

Kasta menentukan jalannya berbagai aspek kehidupan, dalam hal pekerjaan, tingkat kesucian secara rohani, dan kelas sosial. Berdasarkan golongannya, masyarakat dengan kasta rendah sering kali mendapatkan diskriminasi dan eksploitasi oleh kasta lain, terutama bagi masyarakat yang masih memegang erat tradisi kuno (BBC, 2019). Masyarakat dengan kasta rendah sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terlebih perempuan. Hal itu membuat perempuan semakin dipinggirkan dari masyarakat dan sering mendapatkan perlakuan tidak mengenakan yang mengarah pada tindak kekerasan. India memiliki ketimpangan dalam konfigurasi tenaga kerja berdasarkan gender (Agrwal, 2014). Perempuan cenderung lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal. Berdasarkan Global Gender Gap Report 2020 oleh World Economic Forum, India menempati peringkat 112 dari 153 negara. Selain itu pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja laki- laki dan perempuan memiliki ketimpangan yang

sangat tinggi. Tenaga kerja laki- laki berjumlah 287,4 juta jiwa, sedangkan perempuan 79,86 juta jiwa dalam pekerjaan formal (Maizland, 2023).

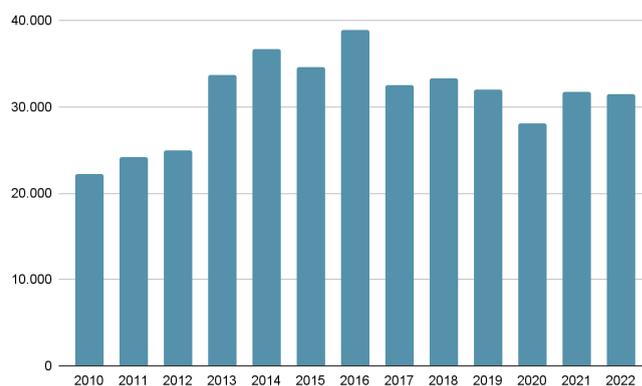
Selain kuatnya sistem kasta pada masyarakat, India juga masih memegang erat sistem patriarki yang sangat merugikan kaum perempuan. Sejak dahulu, perempuan dituntut untuk selalu tunduk pada laki- laki, terutama ketika mereka sudah menikah. Terdapat tradisi *sati* yang mengharuskan perempuan untuk membakar dirinya ketika sang suami telah meninggal dunia, hal ini bermaksud sebagai bentuk pengabdian istri kepada suami. Salah satu tradisi lain yang terkenal di India adalah tradisi pemberian mahar kepada pihak laki- laki oleh pihak perempuan atau yang sering disebut dengan *dowry*. Perempuan harus membayarkan sejumlah mahar, baik berupa uang, perhiasan, maupun hal lain disesuaikan dengan permintaan pihak laki- laki. Dengan tuntutan hidup yang semakin besar, maka semakin besar pula mahar yang harus diberikan oleh perempuan, hal inilah yang membuat pernikahan menjadi hal yang sulit bagi perempuan. Karena apabila perempuan belum dapat memenuhi mahar yang diajukan oleh pihak laki- laki, maka ia akan menjadi budak suaminya dan juga berisiko untuk mendapatkan perlakuan buruk dari keluarga suami (Singh et al., 2022).

Perempuan kerap dipandang sebagai suatu hal yang tidak berharga dan merupakan beban bagi keluarga. Pemikiran ini membuat adanya ketimpangan dari jumlah anak laki- laki dan perempuan di India. Selain itu, keluarga cenderung akan memorduakan anak perempuan dalam hal pendidikan serta hal lainnya (Sah, 2022). Dari hal- hal tersebut, dapat dilihat bahwa kekerasan dan

diskriminasi terhadap perempuan terjadi di berbagai lapisan umur perempuan. Terdapat pula beberapa jenis dari kekerasan terhadap perempuan yang akan dijabarkan secara lebih mendalam.

2.1.1.1 Kekerasan Seksual

Menurut kepala hak asasi manusia PBB, pemerkosaan merupakan "masalah nasional" dan salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi pada wanita di India, menurut Radha Kumar. Organisasi-organisasi hak-hak wanita telah mendorong kriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan sejak tahun 1980-an. Namun, Undang-Undang Hukum Pidana (Amandemen) 2013 tetap mempertahankan pengecualian perkawinan, yang menyatakan dalam klausul pengecualian Pasal 375 bahwa "Hubungan seksual atau tindakan seksual oleh seorang pria dengan istrinya sendiri, yang istrinya tidak berusia di bawah lima belas tahun, bukanlah pemerkosaan." Bahkan di negara-negara industri, kasus-kasus baru dicatat setiap 20 menit, meskipun fakta bahwa insiden yang dilaporkan per kapita cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain (Solanki & Khandelwal, 2023).



Grafik 1. Angka Kekerasan Seksual di India tahun 2010- 2022

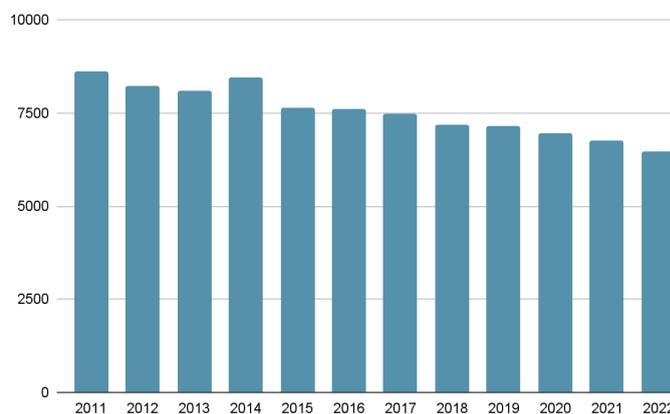
Sumber: Statista, 2023

Berdasarkan data dari NCRB India yang kemudian dikelola oleh Departemen Peneliti Statista, pada tahun 2022, jumlah total kasus pemerkosaan yang dilaporkan di India mencapai lebih dari 31 ribu. Ini merupakan sedikit penurunan dalam kasus pemerkosaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun banyak pemerkosaan yang tidak dilaporkan di negara ini, hal ini merupakan sebuah isu yang terus menerus menjadi berita utama, beberapa di antaranya menyebabkan protes publik. Meskipun laporan pemerkosaan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, hal ini masih dikaitkan dengan rasa malu bagi korban, daripada pelaku (Statistia, 2024).

2.1.1.2 Dowry Death

Undang-Undang Larangan Mas Kawin, yang disahkan oleh pemerintah India pada tahun 1961, melarang permintaan mas kawin selama persiapan pernikahan. Meskipun begitu, sejumlah besar kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kekerasan dalam rumah tangga yang terkait dengan mas kawin telah didokumentasikan. Banyak kejadian seperti itu dilaporkan pada tahun 980-an. Peraturan Larangan Mas Kawin (mencatat hadiah yang diberikan kepada pengantin) ditetapkan pada tahun 1985. Peraturan ini menetapkan bahwa hadiah yang diberikan kepada pengantin pada saat pernikahan harus dicatat dalam daftar yang ditandatangani. Penjelasan singkat tentang setiap hadiah, perkiraan nilainya, nama pemberi, dan hubungan mereka dengan penerima harus dimasukkan dalam daftar. Namun, peraturan ini jarang diikuti (Seth & Modi, 2022).

Menurut sebuah penelitian pada tahun 1997, setidaknya 5,000 wanita India mungkin pergi dari rumah karena mas kawin setiap tahunnya, dan setidaknya dua belas wanita diyakini telah meninggal dalam "kebakaran dapur" yang terjadi dengan sengaja setiap harinya. Hal ini dikenal sebagai "pembakaran pengantin," dan hal ini tidak disukai bahkan di India. Biro Catatan Kejahatan Nasional mendokumentasikan 8,618 kematian akibat mas kawin pada tahun 2011. Menurut perkiraan tidak resmi, jumlahnya setidaknya tiga kali lipat lebih tinggi (Arunachalam, 2023).



Grafik 2. Angka Dowry Death di India Tahun 2010 - 2022
Sumber: Statista, 2024

Pada tahun 2022, kasus kematian akibat mas kawin yang dilaporkan di India berjumlah hampir 6,4 ribu. Ini merupakan penurunan bertahap dari tahun 2014, di mana angka ini mencapai sekitar 8,5 ribu. Sistem mas kawin di India menggabungkan pembayaran dalam bentuk modal, barang tahan lama, real estat dan lainnya, yang diberikan kepada mempelai pria dari keluarga mempelai wanita sebagai syarat untuk menikah (Statista, 2024).

2.1.1.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

India memiliki prevalensi kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi. Mantan menteri Persatuan untuk Perempuan dan Perkembangan Anak, Renuka Chowdhury memperkirakan bahwa 70% dari wanita India menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 1980-an, pasal 498A dari Undang-Undang Hukum Pidana 1983 diadopsi, yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai ketika seorang suami atau kerabat dari seorang wanita melakukan kekejaman terhadapnya. Menurut data dari Biro Catatan Kejahatan Nasional, ada satu kasus kekejaman yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga setiap sembilan menit, satu kasus pembunuhan karena mas kawin setiap 77 menit, satu kasus kejahatan terhadap perempuan setiap tiga menit, dan satu kasus pemerkosaan terhadap perempuan setiap 29 menit (Das et al., 2022).

Hal ini terjadi meskipun Undang-Undang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah melindungi perempuan India dari kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk pelecehan yang dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap wanita diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga di India. Ini termasuk pelecehan yang bersifat fisik, psikologis, atau seksual yang ditujukan kepada pasangan manapun, apakah pasangan tersebut adalah korban atau bukan. Kekerasan dalam rumah tangga dipandang terutama sebagai masalah pribadi atau keluarga dan tidak diperlakukan sebagai kejahatan atau pengaduan. Kasta, kelas, diskriminasi berdasarkan agama, dan ras digunakan untuk mengkategorikan pengaduan dan memutuskan apakah akan mengambil

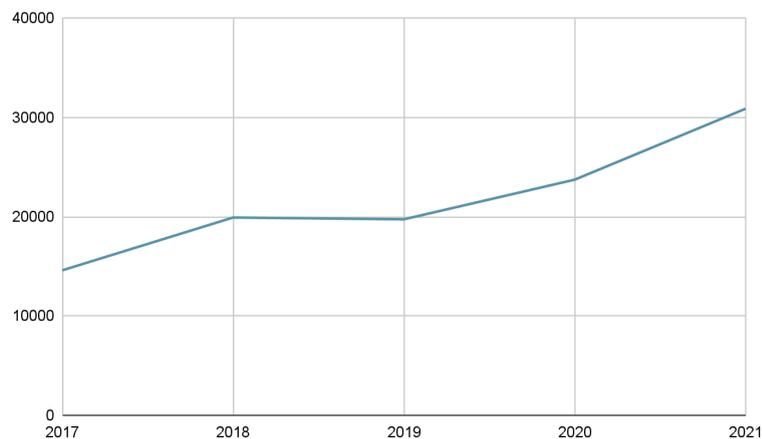
tindakan hukum atau tidak. Sejumlah penelitian telah mendokumentasikan frekuensi pelecehan dan telah mengadopsi perspektif peradilan pidana; meskipun demikian, mayoritas perempuan memilih untuk tidak mengungkapkannya. Terlepas dari kenyataan bahwa para perempuan ini berhak atas kesetaraan, keadilan, dan martabat berdasarkan konstitusi, mereka tetap menolak karena latar belakang sosial budaya mereka. Para perempuan ini tidak mendapatkan perawatan yang tepat karena mereka tidak mau membicarakan pelecehan yang mereka alami dan meminta bantuan (Krishnakumar & Verma, 2021).

2.1.2 The shadow pandemic

Sejak meningkatnya kasus Covid-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia, laporan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. PBB menciptakan istilah *The Shadow Pandemic* atau Pandemi Bayangan untuk fenomena ini. Ketika kasus Covid-19 merebak dan memerlukan upaya kolektif global untuk menghentikannya, layanan- layanan penting lain seperti tempat penampungan korban kekerasan dalam rumah tangga dan saluran bantuan telah mencapai kapasitasnya. Covid-19 memberikan perubahan bagi kehidupan manusia dan membawa kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelompok terpinggirkan dan orang- orang miskin, termasuk perempuan dan anak- anak harus menjumpai banyak risiko tanpa adanya sarana untuk menyerap goncangan ekonomi dan memitigasi krisis kesehatan (UN Women, 2020).

Berdasarkan data dari UN Women, terjadi peningkatan sebanyak 25% dalam kasus kekerasan domestik sejak diberlakukannya sistem lockdown. Di

India sendiri, National Commission of Women (NCW) mencatat bahwa terjadi peningkatan sebanyak 100% pada kasus kekerasan domestik sejak dibukanya hotline darurat. Pemerintah India mengeluarkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar pada 24 Maret 2020. Peraturan ini telah memberikan banyak dampak terutama bagi para perempuan yang harus tinggal setiap waktu dengan pasangannya. Telah diterima lebih dari 1.000 panggilan pengaduan dalam kurun waktu 30 hari. Hal ini disebabkan peningkatan emosi laki- laki karena adanya karantina mandiri, yang kemudian menjurus pada tindak kekerasan. Pada tahun 2020, NCW mendapatkan total 15.640 pengaduan dengan 2.283 pengaduan berasal dari kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, 3.604 merupakan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga, dan 236 kasus lainnya merupakan kasus *dowry death*. Jumlah pengaduan yang diterima oleh NCW meningkat pada tahun 2021 dan menyentuh angka 26.513. Terdapat tiga laporan yang mendominasi dari laporan tersebut, 4,209 laporan kasus pelecehan mahar atau *dowry*, 6.049 permohonan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan 8.688 tuntutan perempuan untuk kehidupan yang aman (Krishnakumar & Verma, 2021).



Grafik 3. Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan di India yang Diterima oleh NCRB (National Crime Record Bureau)

Sumber: Annual Report National Crime Record Bureau, 2023

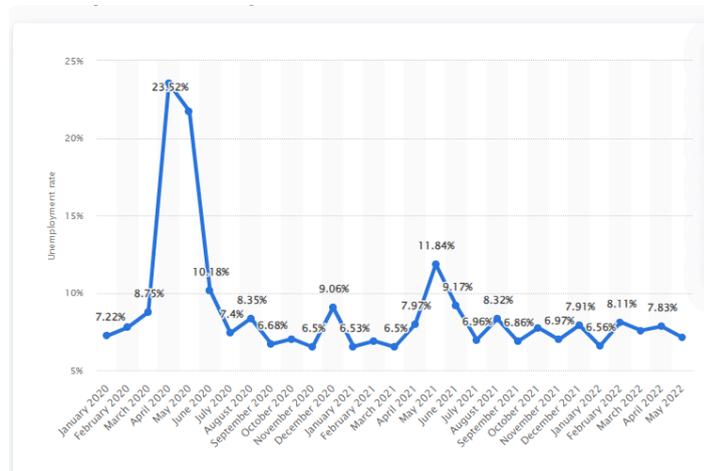
Pandemi Covid-19 terjadi pada peralihan tahun 2019 menuju 2020. Terjadi peningkatan tajam dan konsisten dalam data pengaduan kekerasan terhadap perempuan di India selama masa itu. Berdasarkan grafik 1, pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh NCRB pada tahun 2019 berada pada angka 19.730, angka ini mengalami kenaikan menjadi 23.77 pada tahun 2020, merupakan peningkatan yang cukup signifikan dengan angka 20,23%. Data terus meningkat hingga angka 30.865 pada tahun 2021, yang mana dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini meningkat sebanyak 30,11%.

Sedangkan berdasarkan data panggilan yang dilaporkan oleh National Commission for Women (NCW), sejak berlangsungnya kebijakan isolasi mandiri pada 23 Maret hingga 1 April 2020, terdapat 257 pengaduan yang mana 69 dari mereka adalah pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Antara bulan April hingga Mei, NCW menerima sebanyak total 3.027 pengaduan dan 1.428

diantaranya adalah pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan beberapa data pengaduan yang dilaporkan oleh NCW, kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang umum terjadi pada masa *lockdown*. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah konsumsi alkohol, pemutusan hubungan kerja akibat pandemi, dan keterbatasan bantuan hukum yang dapat diakses oleh korban (OHCHR, 2021).

Konsumsi alkohol merupakan kontributor yang signifikan terhadap terjadinya insiden kekerasan dalam rumah tangga. Konsumsi alkohol menyebabkan perilaku agresif yang meningkatkan risiko kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Selama lockdown, dilarangnya akses terhadap minuman keras meningkatkan tingkat frustrasi di antara banyak laki-laki, yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dalam keluarga, banyak perempuan yang menelepon ke saluran bantuan untuk mendaftarkan pengaduan terhadap suami mereka yang mabuk yang telah memukuli mereka dan anak-anak mereka (Chalakkal, 2020).

Pandemi memberikan dampak yang signifikan bagi hampir seluruh aspek kehidupan. Keadaan sosial dan ekonomi di berbagai negara menjadi kacau akibat dilakukannya lockdown guna mengurangi persebaran virus. India merupakan salah satu negara yang sangat terdampak pandemi dalam sektor perekonomian. Akibat lockdown, banyak laki-laki dan perempuan yang harus menghadapi pemutusan hubungan kerja atau pemotongan gaji.



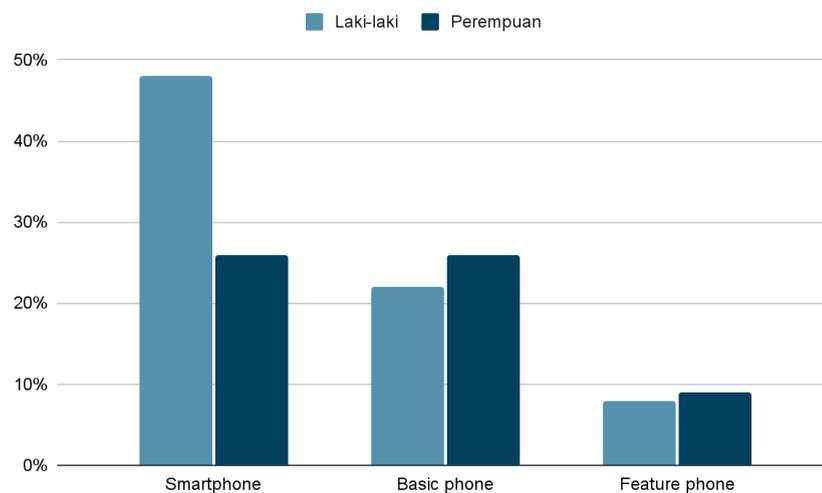
Grafik 4. Pengangguran Akibat Covid-19 di India (Januari 2020- Mei 2022)
Sumber: Statista, 2023

Berdasarkan data pada gambar tiga persentase pengangguran akibat pandemi meningkat pesat pada awal periode Covid-19 yaitu pada bulan Maret hingga Juli 2020. Berdasarkan laporan terbaru dari Pusat Ketenagakerjaan Berkelanjutan di Universitas Azim Premji, pada masa lockdown pertama pada tahun 2020, hanya 7% laki- laki yang kehilangan pekerjaannya, sedangkan persentase perempuan yang kehilangan pekerjaan mencapai angka 47%. Akibat kehilangan pekerjaan, banyak terjadi gejolak dalam rumah tangga. Karantina dan isolasi mandiri yang membatasi pergerakan di dunia luar menyebabkan banyak masyarakat yang kebingungan untuk mencari pekerjaan lain yang dapat mencukupi kebutuhan sehari- hari mereka. Keadaan ini membuat tendensi emosi menjadi meningkat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi (Rathore, 2023).

Karantina mandiri menyebabkan terbatasnya pergerakan masyarakat dalam dunia luar. Bagi para perempuan dengan ancaman KDRT ini merupakan hal yang buruk. Karantina mandiri yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama

membuat ketidakstabilan psikologis dari beberapa manusia. Data yang muncul menunjukkan bahwa sejak merebaknya penyakit virus Covid-19, laporan kekerasan yang dilakukan pasangan intim telah meningkat di seluruh dunia karena adanya kewajiban lockdown untuk mengekang penyebaran virus. Sifat pandemi saat ini, yang memaksa perempuan untuk menghabiskan waktu bersama para pelaku kekerasan dan membatasi mobilitas mereka, telah membuat mereka lebih rentan terhadap pelecehan (Kamath et al., 2022).

Selama pandemi Covid-19, karena pembatasan pergerakan, korban harus tinggal dengan pelaku kekerasan. Perempuan memiliki akses terbatas ke layanan hukum. Seperti yang dilaporkan oleh NFHS-5, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan di banyak negara bagian India selama masa karantina wilayah. Pemerintah Negara Bagian dan banyak LSM meluncurkan nomor-nomor telepon bantuan untuk menawarkan dukungan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena kurangnya pendidikan dan kurangnya kesadaran, para wanita tidak dapat menghubungi nomor-nomor telepon bantuan ini di India. (Krishnakumar, A., & Verma, S., 2021). menemukan kesulitan untuk menghubungi nomor saluran bantuan di hadapan pelaku kekerasan. Kesibukan polisi dalam menerapkan pembatasan wilayah juga menyebabkan peningkatan kasus KDRT karena korban memiliki lebih sedikit akses ke polisi (Chandra, 2020).



Grafik 5. Kepemilikan Ponsel di India Tahun 2021

Sumber: Statista, 2022

Sebuah survei yang dilakukan di India pada tahun 2021 menemukan bahwa 83 persen populasi pria dewasa memiliki ponsel, sementara hanya 71 persen populasi wanita yang memiliki ponsel. Di antaranya, kesenjangan terbesar terjadi antara pemilik ponsel pintar pria dan wanita: sementara 49 persen pria dewasa India memiliki ponsel pintar, hanya 26 persen wanita dewasa India yang memilikinya. Hal inilah yang menyebabkan kesulitan bagi para perempuan untuk menghubungi layanan pengaduan dan bantuan dalam kekerasan terhadap perempuan (Sun, 2023).

2.2 Profil Organisasi UN Women

2.2.1 Sejarah UN Women

Keseriusan PBB terhadap penanganan permasalahan mengenai diskriminasi terhadap kaum perempuan di dunia telah dimanifestasikan dalam beberapa perjanjian, deklarasi, norma, dan standar internasional yang kemudian telah disetujui dan dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Pada tahun 1981,

dibuat sebuah deklarasi sebagai upaya untuk mengurangi permasalahan diskriminasi terhadap perempuan di dunia, deklarasi tersebut adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW). Konvensi ini kemudian dapat diratifikasi oleh anggota PBB sehingga mereka dapat menerapkan norma tersebut pada negaranya (Nurfahirah et al., 2022).

Kemudian, guna memaksimalkan pengentasan permasalahan diskriminasi perempuan di dunia, PBB membentuk sebuah entitas yang berfokus dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu United Nations Women (UN Women). Organisasi ini dibentuk pada bulan Juli 2010 berlandaskan Resolusi Majelis Umum nomor 64/289. UN Women memiliki tugas untuk mempromosikan kesetaraan gender di seluruh dunia, terutama kepada negara-negara dengan angka kekerasan gender yang tinggi, yang biasanya dikarenakan budaya patriarki pada negara tersebut. Guna menjalankan tugasnya dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan memenuhi hak-hak perempuan, UN Women membentuk serangkaian program berupa pemberdayaan dan perbaikan pendidikan untuk perempuan, serta program lain yang mendukung (Hartana & Wibawa, 2021).

Dalam melaksanakan perannya, UN Women memiliki lima tujuan utama yang harus dicapai, yaitu meningkatkan partisipasi perempuan dalam aspek sosial dan politik, menghentikan kekerasan gender terhadap perempuan, memastikan partisipasi perempuan dalam semua upaya perdamaian dan keamanan, meningkatkan mutu pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta memperjuangkan kesetaraan gender yang substansial bagi perempuan. UN

Women memiliki tanggung jawab global untuk mendorong transformasi signifikan dalam kebijakan dan perilaku negara, serta mengubah norma sosial, budaya, dan praktik diskriminatif yang tertanam dalam tradisi dan agama. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan memastikan hak-hak perempuan dalam kehidupan mereka yang masih didiskriminasi dan mengalami kekerasan setiap hari (UN Women, n.d.).

Bertempat di New Delhi, UN Women mendirikan kantor di India sejak peresmianya, Kantor yang berpusat di India ini mewakili empat negara bagian, yaitu India, Bhutan, Maladewa, dan Sri Lanka. Di India, UN Women bertugas untuk meningkatkan hak-hak perempuan dengan cara melakukan kerjasama antar laki-laki, perempuan, pemerintah, otoritas lokal, kaum feminis dan gerakan perempuan, serta masyarakat sipil. Kerjasama ini dilakukan untuk menciptakan strategi nasional dalam kesetaraan gender yang sejalan dengan prioritas nasional dan internasional.

2.2.2 Kontribusi UN Women di India

Sejak berdirinya UN Women di India yang berbasis di New Delhi, UN Women memiliki beberapa tugas yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan memperkuat hak-hak perempuan dengan bekerjasama dengan kaum laki-laki, lembaga swadaya masyarakat setempat, pemerintah, dan masyarakat sipil lainnya. Program-program UN Women di India merujuk pada pendudukan pembuatan kebijakan hukum yang mendukung perempuan. Selain itu, UN Women di India juga memberikan dukungan kepada perempuan dalam seluruh aspek kehidupan dengan berfokus pada enam bidang utama.

Fokus pertama adalah dalam hal hak asasi manusia, UN Women di India berusaha untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak perempuan, yang mana kekerasan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran berat terhadap HAM. UN Women berusaha untuk mengentaskan segala permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan dukungan untuk pencegahan juga perawatan. Organisasi ini juga berusaha untuk menciptakan ruang aman yang dapat dinikmati oleh seluruh perempuan serta memastikan bahwa segala hak yang mereka miliki akan terjamin (UN Women, n.d.).

Fokus kedua adalah dalam hal kepemimpinan dan partisipasi. Untuk memberikan perempuan kekuasaan atas keadilan dan layanan publik, UN Women bekerja sama dengan perwakilan perempuan terpilih dan membantu mengedukasi mereka tentang hak-hak mereka. Program Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif Gender UN Women mendukung perempuan dalam kepemimpinan politik dan tata kelola pemerintahan di India, Bhutan, Maladewa, dan Sri Lanka dengan dukungan dana dari pemerintah Norwegia (UN Women, 2020).

Tujuan dari inisiatif UN Women untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik adalah untuk mengatasi masalah dan hambatan yang dihadapi setiap negara dalam kaitannya dengan pemberdayaan politik perempuan. Program ini, yang didorong oleh permintaan, mencoba memahami dan menangani tantangan terkait keterlibatan perempuan dalam pemerintahan lokal dari sudut pandang akar rumput. Tujuan program ini adalah untuk membuat lembaga-lembaga federal menjadi lebih peka terhadap gender

sehingga perempuan dapat bekerja untuk perempuan dan bukannya mengharapkan perempuan bekerja untuk struktur pemerintahan lokal di Asia Selatan (Raihan, 2023).

Fokus ketiga adalah perencanaan dan penganggaran nasional. UN Women berkolaborasi dengan para perencana keuangan seperti NITI Aayog, bank, dan para ahli ekonomi untuk memastikan bahwa anggaran dan kebijakan negara di setiap negara bagian di India telah mempertimbangkan atau mencerminkan kebutuhan perempuan. Untuk memajukan penganggaran yang tanggap gender di India, UN Women juga memberikan dukungan kepada Kementerian Pembangunan Perempuan dan Anak dan mitra-mitra lainnya. Untuk lebih mencerminkan kontribusi perempuan dalam sistem akuntansi nasional, UN Women berfokus pada pekerjaan perempuan di sektor formal dan informal, terutama untuk pekerja rumahan.

Fokus keempat adalah pemberdayaan di bidang ekonomi. UN Women mengadvokasi hak-hak ekonomi perempuan untuk bekerja di bidang bisnis, pertanian, dan pengasuhan, di antara bidang-bidang ekonomi lainnya, untuk mencegah diskriminasi, eksploitasi, dan kemiskinan. UN Women mendukung hak-hak perempuan untuk memiliki properti dan aset dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dengan menciptakan jaringan kemitraan perempuan yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan, UN Women juga mendorong pembelaan terhadap hak-hak pekerja migran dan perempuan yang bekerja di sektor yang tidak terorganisir. Meningkatkan suara perempuan di

sektor ekonomi formal dan informal adalah tujuan lain dari UN Women (UN Women, n.d.).

Fokus kelima adalah keamanan dan ketenangan bagi perempuan. Perlindungan perempuan dan anak perempuan dalam situasi krisis dari kekerasan seksual berbasis gender telah menjadi pokok bahasan dalam Resolusi PBB 1325 (2000) dan beberapa resolusi tambahan. Melalui Kursus Petugas, UN Women berkontribusi pada pelatihan polisi dan petugas sesuai dengan resolusi-resolusi tersebut.

Fokus keenam adalah Migrasi. Dalam rangka mempromosikan migrasi yang responsif gender bagi para pekerja rumah tangga perempuan dari India ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), UN Women di India mengedukasi para calon migran yang aman dan sah tentang bahaya migrasi yang tidak aman dan tidak teratur.